BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Cina merupakan negara dengan populasi terbesar di dunia. Pada tahun 2012, total populasi di daratan Cina (termasuk 31 provinsi, daerah otonom, kota dan CPLA, termasuk Hong Kong SAR, Macao SAR, Provinsi Taiwan, dan Cina perantauan) adalah kurang lebih 1,48 milyar jiwa, meningkat 14,7 juta jiwa dibandingkan dengan akhir tahun 2010. Kelahiran tahunan mencapai 16 juta jiwa, dibanding tingkat kematian yang mencapai 9,6 juta jiwa (http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_detail.jsp?channelid=1175&record=33 diakses 01/12/12 pada 15.05 WIB).

Jika melihat sejarahnya, masalah penduduk merupakan pokok penting yang menyentuh pada kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa Cina, keberhasilan atau kegagalan modernisasi Cina serta pembangunan yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara penduduk di satu sisi, dan ekonomi, masyarakat, sumber daya dan lingkungan di sisi lain.

Dalam 15 tahun sejak berdirinya Republik Rakyat tahun 1964, penduduk Cina meningkat antara 500-700 juta jiwa, dengan rata-rata peningkatan populasi sebanyak 100 juta populasi per 7,5 tahun. Antara 1964-1974 adalah periode dimana pertumbuhan penduduk Cina dengan kecepatan yang tinggi, dengan jumlah penduduk

meningkat sebesar 700-900 juta jiwa. Pada tahun 1973, Cina mulai mempromosikan kebijakan keluarga berencana di seluruh negeri. Penduduk Cina meningkat 900-1,2 milyar jiwa pada periode dari tahun 1973 sampai Februari 1995, dan waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan populasi sebesar 100 juta lagi diperpanjang menjadi sekitar tujuh tahun (http://www.fmprc.gov.cn/ce/celt/eng/zt/zfbps/t125241.htm diakses 01/12/12 pada 17.05 WIB).

Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya pemerintah Cina mengumumkan untuk memberlakukan kebijakan satu anak di Cina, sebab ledakan pertumbuhan penduduk menyimpan bahaya bagi kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Semua pasangan di Cina hanya menanggung satu anak saja (http://www.docshare.com/doc/136846/OneChild-Policy-in-China1 diakses 03/12/12 pada 19.40 WIB).

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol populasi yang notabene sebagai negara dengan populasi yang penduduknya terpadat didunia dan pemerintah pun berusaha untuk meningkatkan standar kehidupan dan stabilitas ekonomi di masyarakat Cina. Pemerintah kemudian melakukan reformasi kebijakan yang dinilai komprehensif dalam sektor ekonomi untuk menarik investasi asing dan domestik. Dan pada akhirnya perekonomian Cina mulai bangkit kembali.

Pada awal dekade 1966-1976 saat revolusi kebudayaan, populasi penduduk Cina meningkat tajam dibawah ide generasi pertama pemimpin ketua Mao tentang "lebih banyak orang, semakin kuat kita" (Xi, 2006:5). Kebijakan satu anakan ini lalu diperkenalkan pada tahun 1978 dan pada awalnya diterapkan untuk anak pertama

lahir dari tahun 1979. Kebijakan ini mengundang kontroversi baik di dalam maupun di luar Cina karena cara di mana kebijakan tersebut dilaksanakan dan karena kekhawatiran tentang konsekuensi sosial yang negatif. Ketika Cina menjalankan sensus pertamanya yaitu pada 1953, penduduk Cina berjumlah 582 juta jiwa, sedangkan pada sensus kelima pada tahun 2000 meningkat dua kali lipat sebesar 1,2 milliar jiwa. Kebijakan ini mengakibatkan peningkatan aborsi paksa, pembunuhan bayi perempuan. Hal ini disinyalir sebagai kemungkinan penyebab di balik ketidaksetaraan *gender* di Cina dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (http://www.pewglobal.org/2008/07/22/the-chinese-celebrate-their-roaringeconomy-as-they-struggle-with-its-costs/ diakses 04/12/12 pada 17.25 WIB).

Dalam hal ini pihak perempuan sangat dirugikan di Cina. Adapun salah satu kekurangan yang ditemukan pada kebijakan satu anak yaitu adanya isu ketidakseimbangan rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini awalnya disebut sebagai "*last resort*" yang akan berlangsung 20-30 tahun untuk meringankan kekurangan sumber daya penduduk Cina. Meskipun terjadi pelonggaran penegakan aturan, dengan pengecualian yang bervariasi antar provinsi, kebijakan terus dilakukan tegas mencegah kelahiran di Cina. Sampai hari ini, pemerintah Cina memastikan bahwa Kebijakan Satu-Anak telah mencegah 400 juta kelahiran (http://www.allgirlsallowed.org/category/topics/one-child-policy-china). Hal ini secara tidak langsung membawa dampak negatif bagi tatanan sosial di Cina mengenai peran wanita/perempuan dan anak yang hak nya di tekan oleh kebijakan tersebut.

Kekerasan yang terjadi terhadap keduanya pun sangat tinggi dan menimbulkan keterasingan bagi korban.

Dengan adanya kebijakan ini, Cina menjadi salah satu negara yang menjadi tempat praktek kekerasan kaum perempuan dan anak-anak di bawah umur, hal ini terjadi sebagai dampak yang diakibatkan oleh pemerintah yang memberlakukan kebijakan satu anak. Kekerasan yang terjadi sangat beragam mulai dari psikis yang bersangkutan, seperti adanya keterasingan dalam lingkungan social serta kekerasan fisik yaitu aborsi janin untuk mencegah kehamilan berikutnya. UNICEF sangat peduli terhadap perlindungan anak dan perempuan dalam kasus yang terjadi di Cina. Hal ini didasarkan atas konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak dimana Cina menjadi Negara anggota, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan *Convention on Elimination of all forms of discriminations Against Women* (CEDAW) merupakan landasan kuat UNICEF untuk membantu mengatasi kekerasan terhadap anak dan perempuan atas dampak dari kebijakan satu anak di Cina. *All Girls Allowed* sebuah merupakan organisasi yang peduli dengan kelangsungan hidup anak dan perempuan di Cina, mereka juga menekankan bahwa pentingnya perempuan dalam kehidupan masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk memiliki keturunan. Adapun lima landasan yang dapat dijadikan sebagai dasar perjuangan hak anak itu sendiri, antara lain:

a. Anak – anak harus mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan bagi perkembangan normal, baik fasilitas materil maupun spiritual;

b. Anak – anak yang lapar harus diberi makanan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang mengalami keterbelakangan harus dibantu dan dibimbing, anak yang nakal harus mendapatkan pemulihan, anak yatim dan terlantar harus dilindungi dan mendapat bantuan;
c. Anak – anak harus menjadi penerima bantuan internasional ketika terjadi situasi yang berbahaya;
d. Anak – anak harus ditempatkan dalam posisi untuk mendapatan nafkah hidup dan harus dilindungi dalam semua bentuk eksploitasi;
e. Anak harus terus-menerus disadarkan bahwa bakat mereka pun harus diarahan untuk melayani sesama (http://www.unicef.org/uk/pages.asp?page =92/ diakses tanggal 13/12/12 pada 15.04 WIB).

Kerjasama UNICEF dengan Cina telah terjalin selama lebih dari 70 tahun, sejak 1947. Kerjasama ini dilanjutkan pada tahun 1979 seiring dengan keluarnya kebijakan satu anak di Cina. Dalam hal ini, kerjasama UNICEF-Cina dalam beberapa aspek menyangkut kesejahteraan, melihat banyaknya praktek-praktek aborsi illegal dan terasingnya perempuan yang mengalami hal tersebut. Maka pada tahun 2004, UNICEF mencanangkan kampanye *"Women and Children First"*, sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan yang menyangkut kelangsungan hidup perempuan dan populasi penduduk di Cina (http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=in dex&a=lists&catid=25 diakses tanggal 17/12/12 pada 13.24 WIB).

Dari kasus diatas, didapati suatu interaksi dalam bentuk kerjasama dalam penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cina dalam konteks kebijakan nasional yakni *One Child Policy*. Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul :

"Peranan *United Nations of Children's Fund* (UNICEF) melalui Kampanye *"Women and Children First"* pada tahun 2004 dalam mengurangi dampak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-Anak di Cina" .

Peneliti mengambil rentang waktu penelitian dimulai sejak tahun 2004 sampai 2008. Rentang tahun ini dipilih karena dua momentum, yaitu pada tahun 2004 UNICEF memulai kampanye, dan pada tahun 2008 dimana Cina menjadi tuan rumah pesta olahraga olimpiade. Tahun 2008 yang penulis ambil, merujuk dimana Cina menampilkan diri sebagai negara yang maju secara ekonomi, dan penduduknya makmur, dengan menjadi tuan rumah olimpiade. Pemilihan tahun 2008 ini dipilih oleh peneliti, karena melihat kampanye itu terus berlangsung hingga sekarang dan perlu adanya batasan waktu yang tidak terlalu jauh. Maka penulis memilih tahun tersebut karena pada tahu 2008 Cina menjadi tuan rumah olimpiade, yang mengharuskan Cina menampilkan diri sebagai negara yang maju dengan ekonomi dan pembangunan manusianya.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain :

1. Pengantar Hubungan Internasional, merupakan peletak dasar bagi penelitian yang akan dilakukan, terkait hubungan para aktor yang melewati batas – batas negara.
2. Organisasi dan Administrasi Internasional, merupakan fokus kajian peneliti terhadap permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterlibatan salah satu UNICEF sebagai wujud implementasi dari fungsi dan peran organisasi internasional.
3. Isu – isu Global, karena masalah yang dikaji merupakan salah satu isu Global yaitu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Internasional.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Peranan *United Nations of Children's Fund* (UNICEF) melalui *Women and Children First* dalam mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-Anak di Cina".

Rumusan masalah minor:

1. Apa saja kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang ditimbulkan akibat dampak dari kebijakan satu anak di Cina?

2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh UNICEF melalui kampaye *Women and Children First*?
3. Kendala apa saja yang dihadapi UNICEF dalam mengimplementasikan kampanye *Women and Children First*?
4. Apa saja keberhasilan yang dicapai melalui kampanye *Women and Children First*?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan UNICEF sebagai *Inter-Governmental Organization* (IGO) yang sangat peduli dengan kesehatan dan perlindungan terhadap bayi, anak, serta perempuan sebagai konsentrasi tugas dan fungsinya dalam dunia internasional.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti membahas kasus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa saja kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang ditimbulkan akibat dampak dari kebijakan satu anak di Cina?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh UNICEF melalui kampaye *Women and Children First*?
3. Kendala apa saja yang dihadapi UNICEF dalam mengimplementasikan kampanye *Women and Children First*?
4. Apa saja keberhasilan yang dicapai melalui kampanye *Women and Children First*?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai keterlibatan suatu Organisasi Internasional, dalam mengatasi suatu permasalahan. Dalam hal ini bagaimana UNICEF melakukan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional berdasarkan teori-teori yang terkait hal tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan infromasi dan studi empiris bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap peranan suatu organisasi internasional untuk meindungi hak-hak perempuan dan anak untuk memperoleh hak hidup seiring diberlakukannya kebijakan satu anak di Cina.